

KAJIAN KEMISKINAN PADA TIGA KABUPATEN/KOTA, DI PROVINSI MALUKU

(*Poverty Study in Three Districts/Cities, Maluku Province*)

Elsjamina M Latuny^{1*}, Izaak T. Matitaputty^{1*}

¹ Jurusan Manajemen Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura, Ambon

* penulis korespondensi : nona.latunys@gmail.com

ABSTRACT

Maluku province occupied poverty level number four from 34 provinces in Indonesia. The research aims to analysis the influence of government spending, private investments and human development indices on poverty in the provincial districts of Maluku. The data used in this research is time-guided data from 2008 – 2018 in three district cities namely Ambon City, central Maluku Regency and Tanimbar Islands Regency. Data analysis using a panel data regression with Common Effects Model (CEM) method, Fixed Effects Model (FEM), and Random Effects Model (REM). The results of research based on estimation of panel data showed that government expenditure and human development index, significantly influenced the level of poverty in the three districts of the city while private investments did not significantly affect poverty.

Keywords: data panel, government expenditure, human development index, private investment

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kekurangan yang nyata dalam hal kesejahteraan (World Bank, 2000). Masyarakat yang sejahtera dalam konteks ekonomi dapat dicapai apabila masyarakat mendapat kepuasan atas barang dan jasa yang dikonsumsi (*optimal utility*), sedangkan secara kebijakan sosial, kesejahteraan itu dapat terwujud apabila jangkauan pelayanan oleh negara dilakukan secara luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori kesejahteraan (*welfare theory*) disebutkan oleh kaum klasik bahwa kesejahteraan sosial bagi masyarakat itu dapat terwujud melalui mekanisme pasar sehingga alokasi sumber daya alam maupun faktor produksi lainnya yang digunakan dalam kegiatan ekonomi secara efisien dan redistribusi kesejahteraan melalui pajak progresif. Namun dalam kenyataannya yang muncul adalah pasar itu tidak sempurna (*imperfect market*) melalui praktek-

praktek monopolis, kartel, dan informasi yang tidak sempurna sehingga menyebabkan alokasi sumber daya alam maupun manusia menjadi tidak efisien dan menimbulkan ketidakadilan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (kemiskinan).

Berdasarkan laporan *Sustainable Development Goals* tahun 2015, keseriusan pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan selama 10 tahun terakhir dapat dilihat dari persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan berkurang dari 17,75% pada tahun 2006 menjadi 10,12% pada tahun 2017. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 sebesar 9,41%, menurun 0,25% dibandingkan dengan bulan September tahun 2018 dan presentase ini menurun 0,41% jika dibandingkan dengan bulan Maret pada tahun yang sama. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun

0,53 juta orang dibandingkan bulan September 2018 dan menurun 0,80 juta orang pada bulan Maret tahun yang sama (BPS, 2019). Menurunnya persentase kemiskinan merupakan angka rata-rata nasional yang tidak menggambarkan realitas kemiskinan yang terjadi di setiap provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target yang telah ditetapkan, variasi kemampuan tiap-tiap daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah harus diperhatikan mengingat penyebab kemiskinan tidaklah sama di semua daerah, bahkan ukurannya pun bisa berbeda-beda tergantung kondisi setempat. Menurut Ahluwalia *et al.*, (1979), pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara berkembang menggunakan model persamaan tunggal dengan memprediksi kemiskinan dengan distribusi pendapatan dan variabel endogen adalah PDB serta jumlah penduduk, hasilnya ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya dirasakan/dinikmati oleh masyarakat miskin pada tingkatan tertentu saja.

Ravallion dan Chen, (2004), melaporkan bahwa di Indonesia terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara ekstrim dalam lingkup negara namun tidak berlaku pada setiap provinsi. Hal ini juga berlaku bagi Provinsi Maluku yang memiliki tingkat kemiskinan masih

sangat besar dan berada pada urutan empat dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan di provinsi ini memiliki keterbatasan dan ketidakmampuan sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kondisi demikian menjadi permasalahan utama yang sering dihadapi oleh Pemda daerah setempat dari tahun ke tahun.

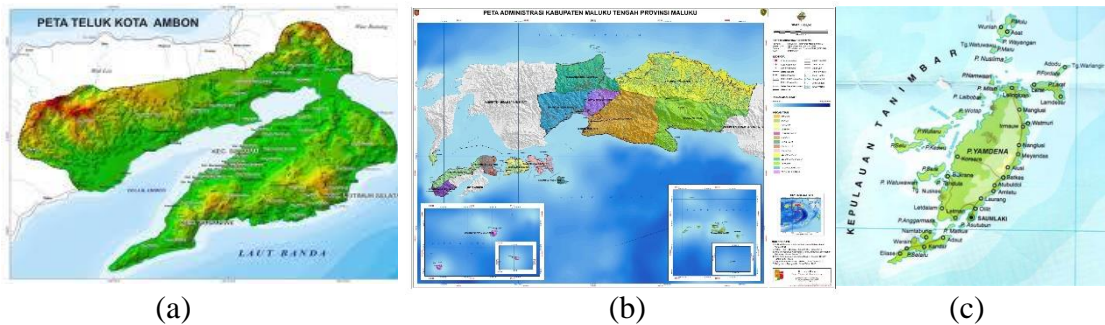
Karakteristik geografis suatu daerah juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu negara. Provinsi Maluku yang berkarakteristik wilayah kepulauan menyumbang variasi sebaran kemiskinan yang semakin tinggi (Djuraidah dan Wigena, 2012). Sebagian besar masyarakat di provinsi ini masih berada di bawah garis kemiskinan dan terjadi ketimpangan dalam pembangunan di antara kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Maluku. Hal ini harus dicermati dengan serius oleh berbagai pemangku kepentingan di Provinsi ini untuk membuat berbagai kebijakan program pengentasan kemiskinan dalam mengatasi kesenjangan kemiskinan di wilayah ini.

Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor apakah yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku sehingga menjadi bahan masukan bagi Pemda Maluku dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan pada tiga kabupaten/kota yaitu Kota Ambon, Maluku Tengah, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar/KKT (Gambar 1). Data penelitian diambil dari data sekunder Badan Pusat Statistik selama periode tahun 2008-2018. Analisis data

menggunakan regresi data panel dengan metode *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* sehingga model persamaannya sebagai berikut : $Y_{dak} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$; dimana : Y = Kemiskinan; X_1 = Pengeluaran Pemerintah; X_2 = Investasi Swasta; X_3 = IPM; ε = galat/error.



Gambar 1. Peta Kota Ambon (a), Kabupaten Maluku Tengah (b), dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (c)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Panel

Hasil uji normalitas, tidak menunjukkan hasil yang signifikan ($P < 0,05$) sehingga disimpulkan bahwa data menyebar tidak normal dan dilanjutkan dengan transformasi dalam bentuk logaritma natural. Hasil analisis data panel menggunakan model *common effect* dan *fixed effects* sebagai berikut :

a. Common Effects Models

$$\ln Y = 0.357326 + 0.482517 \ln X_1 + 1.112783 \ln X_2 - 0.408163 \ln X_3$$

$$R^2 = 0.697819 \quad DW = 0.433856$$

b. Fixed Effects Models

$$\ln Y = 12.70834 + 0.361141 \ln X_1 - 0.549867 \ln X_2 + 0.301865 \ln X_3$$

$$R^2 = 0.819702 \quad DW = 1.537712 \quad F_{hit} = 61.45612$$

c. Random Models

Analisis data menggunakan software Eviews (<http://eviews.com>). Hasil analisis terhadap model pengaruh acak tidak bisa dilanjutkan karena jumlah data cross section harus lebih besar dari jumlah data time series. Model di atas harus memenuhi asumsi klasik yang meliputi normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas (Gujarati, 2004). Selanjutnya dilanjutkan dengan Pooled Least Square Models (PLS) dan pengaruh Fixed effects.

Model yang Dipilih

Berdasarkan analisis data maka ditentukan model terpilih (Uji Chow) yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Chow

Redundant Fixed Effect Test			
Pool : LNY			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistics	d.f.	Prob.
Cross-section F	49.020161	(2,27)	0.000000

Berdasarkan perbandingan nilai R^2 antara model common effect dengan model fixed effect maka terlihat bahwa nilai korelasi model fixed effect lebih

besar daripada nilai PLS maupun berdasarkan uji Chow sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect.

Uji t

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hit} lebih besar daripada t_{tabel} , maka nilai t_{hit} berada pada daerah penolakan H_0 sehingga keputusannya H_0 ditolak dan H_1 diterima atau variabel independen secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan berupa pengeluaran

pemerintah dan indeks pembangunan manusia sedangkan investasi kurang signifikan. derajat bebas $n - k$ atau $(33 - 4 = 29)$ dan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai t_{tab} sebesar 1.699127. Besarnya nilai uji statistik bagi model individual pada regresi data panel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji t Model Regresi *Fixed Effect* dirinci sesuai kabupaten/kota

Variabel	t_{hit}	Probabilitas	t_{tab}	Kesimpulan
Ln X_1	3.344285	0.0038	1.699127	Signifikan
Ln X_2	9.74519	0.0000	1.699127	Signifikan
Ln X_3	1.452263	0.1206	1.699127	Tidak signifikan

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh signifikan. Hal ini berarti bahwa kedua indikator ini diduga berkontribusi dalam memengaruhi persentase kemiskinan di ketiga wilayah penelitian.

Uji F

Berdasarkan output perhitungan regresi data panel dengan model fixed effects nilai F_{hit} sebesar 61.45612 dengan probabilitas 0.000000. Nilai F_{tab} dengan df denominator 30 dan df numerator 3, adalah 2.922277. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, semua variabel bebas secara simultan secara signifikan dipengaruhi oleh variabel terikat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Selain itu IPM juga merupakan data strategi untuk mengukur kinerja pemerintah dan capaian dalam pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Capaian IPM di provinsi

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji kualitas model empiris. Nilai koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat serta pengaruhnya secara *general*. Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1) berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memproxi variasi-variabel terikat. Dari hasil estimasi regresi panel model fixed effects, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.819 dan nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0.806. Artinya, model yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel terikat sebesar 80,67% dan sisanya 19,32% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Maluku selama periode 2008 sampai dengan 2018 berfluktuasi pada setiap kabupaten/kota. Selanjutnya capaian IPM setiap kabupaten/kota di provinsi Maluku disajikan pada Tabel 3.

IPM di Provinsi Maluku selama periode tahun 2008 dan 2009 termasuk tinggi (Tabel 3).

Tabel. 3. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Periode 2008-2018

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kepulauan Tanimbar	67,58	68,16	57,08	57,69	58,56	59,34	59,81	60,26	61,12	61,64	62,39
Maluku Tenggara	71,45	71,98	60,58	60,96	61,75	62,11	62,74	63,35	64,20	64,94	65,59
Maluku Tengah	69,63	70,33	66,12	66,64	67,3	67,89	68,69	68,85	69,54	70,09	70,6
Buru	68,03	68,69	61,6	62,5	63,5	64,31	65,15	65,75	66,63	67,61	68,25
Kepulauan Aru	69,39	69,92	58,22	58,6	59,17	59,62	59,91	60,50	61,32	62,12	63,12
Seram Bagian Barat	66,67	69,29	59,9	60,59	61,47	61,79	62,39	63,02	63,76	64,34	65,14
Seram Bagian Timur	67,06	67,72	57,88	58,07	58,07	58,88	51,50	60,27	61,15	62,06	62,98
Maluku Barat Daya	65,96	66,24	55,75	56,1	56,74	57,34	58,09	56,64	59,43	60,16	60,64
Buru Selatan	67,71	68,1	57,3	57,98	58,91	59,89	60,74	61,48	62,19	62,75	63,62
Ambon	77,86	78,37	76,07	76,7	77,49	78,16	79,09	79,30	79,55	79,82	80,24
Tual	75,9	76,36	61,7	62,69	63,56	64,16	64,95	65,20	65,64	66,25	67,21
Maluku	70,38	70,96	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74	67,05	67,60	68,19	68,87

Sumber data : BPS Provinsi Maluku (2008-2018)

Selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan 2018 sekalipun berfluktuasi tetapi masih dalam kategori sedang dibandingkan dengan angka nasional 70,81 (kategori tinggi). IPM dari ketiga kabupaten kota yaitu Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan kabupaten KKT cukup bervariasi. IPM Kota Ambon antara tahun 2008 sampai dengan 2018 masuk kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2008 sampai tahun 2016 (kecuali tahun 2009) termasuk kategori sedang, selanjutnya pada tahun 2009, 2017, dan 2018 termasuk kategori tinggi. Selanjutnya IPM KKT pada tahun 2008, 2009, 2016, 2017 dan 2018 termasuk kategori sedang, dan tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 termasuk kategori rendah. Adanya variasi dalam kategori IPM menunjukkan bahwa ketiga wilayah penelitian ini mempunyai karakteristik yang berbeda dalam hal kualitas hidup dan standar pendidikan yang layak.

Kota Ambon termasuk dalam IPM kategori tinggi disebabkan oleh kualitas

hidup dan standar pendidikan yang layak ada di kota ini jika dibandingkan dengan kedua kabupaten lainnya yang rata-rata mempunyai standar kehidupan yang belum memadai termasuk dalam kategori tinggi (Tabel 3).. Menurut Meliana & Zain, (2013), IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Selain itu IPM hadir sebagai alat ukur yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara menyeluruh karena dapat menggambarkan faktor ekonomi dan non-ekonomi (Aji *et al.*, 2014).

Variabel pengeluaran pemerintah menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahannya. Variabel ini memiliki hubungan yang positif dengan selisih rencana investasi dengan realisasinya. Artinya bahwa adanya kenaikan kenaikan pengeluaran

pemerintah akan menambah rencana investasi swasta di dalam negeri. Pengeluaran pemerintah provinsi Maluku untuk 11 kabupaten/kota selama periode 2008-2018 mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2009 sedikit mengalami penurunan. Penurunan pengeluaran pemerintah tahun 2009 disebabkan oleh dampak resesi ekonomi Indonesia tahun 2008. Belanja operasional/konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang semakin tinggi menyebabkan rendahnya prioritas pada pelayanan publik. Hal ini sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan antara kota dengan kabupaten (Rusdarti & Sebayang, 2013).

KESIMPULAN

Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku sangat bervariasi antara tiap Kabupaten/Kota. Kabupaten KKT mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pengeluaran pemerintah secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Pemerintah daerah harus konsisten merealisasikan anggaran yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat yang pada akhirnya tingkat kemiskinan menurun. IPM secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota

Investasi merupakan awal dari pembangunan ekonomi. Untuk itu sangat diharapkan peran pemerintah dalam memacu investasi khususnya investasi swasta untuk memicu naiknya pengeluaran pemerintah. Hal yang sama diharapkan juga bagi pemerintah provinsi Maluku untuk dapat memicu para investor swasta melalui paket-paket kebijakan di berbagai bidang yang memudahkan bagi pengusaha untuk berinvestasi di Maluku.

di Provinsi Maluku. Investasi swasta tidak secara signifikan memengaruhi kemiskinan di Provinsi Maluku, namun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan kapasitas kaum miskin di berbagai sektor melalui berbagai bantuan pemberdayaan bagi masyarakat yang kurang mampu. Strategi dasar yang harus digunakan dalam pengentasan kemiskinan yaitu membuka kesempatan kerja bagi kaum miskin melalui pusat pertumbuhan ekonomi dan membangun kapasitasnya untuk memproduksi melalui kepemilikan aset seperti pendidikan, kesehatan, kepemilikan lahan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, M. S., Carter, N. G., & Chenery, H. B. (1979). Growth and Poverty in Developing Countries. *Journal of Development Economic*, 6(December 1978), 299–341. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(79\)90020-8](https://doi.org/10.1016/0304-3878(79)90020-8)
- Aji, S., Syarifudin, D., & Ishak, R. (2014). Identifikasi tipologi wilayah perbatasan antar kabupaten/ kota dan indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Barat.

Presentasi Hasil Penelitian Hibah Program Desentralisasi, Sentralisasi Dan Hibah Internal Unpas, halaman 145–149.

- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2019). *Presentase jumlah penduduk miskin di Indonesia*. BPS (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>) diakses tanggal 25 Juni 2019.
- Djuraidah, A., & Wigena, H. (2012). Regresi Spasial untuk Menentukan Faktor- faktor Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Statistika*, 12(1), 1–8.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics 4th Edition*. In *Tata McGraw-Hill*. <https://doi.org/10.1126/science.1186874>
- Meliana, A., & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(2), 237–242.
- Ravallion, M., & Chen, S. (2004). China ' s (Uneven) Progress Against Poverty. In *World Bank Policy Research Working Paper 3408, September 2004*.
- Rusdarti, & Sebayang, L. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economica*, 9(1), 1–9.
- World Bank. (2000). *World Development Report 2000 / 1 Attacking Poverty*. *Oxford University Press*, 1–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1596/0-1952-1129-4>